BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap aktivitas bisnis pada dasarnya tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kerugian maupun keuntungan. Kemungkinan terjadinya kerugian dalam dunia bisnis dikenal sebagai risiko, yaitu suatu kondisi ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi. Risiko dalam bisnis mencakup berbagai dimensi, baik yang bersifat finansial maupun non finansial, dan keduanya berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Hal ini sifatnya yang melekat pada setiap kegiatan usaha, termasuk risiko kegagalan, kerugian operasional, hingga guncangan kondisi ekonomi yang tidak terduga, maka setiap perusahaan dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang terencana, efektif, dan berkesinambungan.

Perkembangan teknologi dan dinamika persaingan global saat ini mendorong aktivitas bisnis menjadi semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Semakin tinggi target keuntungan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, semakin besar pula eksposur risiko yang harus dihadapinya. Perusahaan yang tidak memiliki kesiapan dalam mengantisipasi risiko berpotensi mengalami dampak negatif yang tidak hanya merugikan operasional internal, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dalam konteks persaingan bisnis yang semakin ketat ini, transparansi dalam pelaporan kinerja perusahaan menjadi semakin krusial. Perusahaan diharapkan mampu mengungkapkan kondisi dan risiko bisnisnya secara terbuka agar para pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang andal dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan (Adam & Mukhtaruddin, 2016).

Risiko merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas bisnis, karena setiap keputusan manajerial selalu mengandung ketidakpastian yang dapat memengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Manajemen risiko yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini, menilai dampaknya, serta menetapkan strategi mitigasi yang sesuai agar operasional tetap berjalan stabil. Selain itu, penerapan sistem manajemen risiko

yang baik berkontribusi dalam memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang secara berkelanjutan (Wibowo, 2022). Maka dari itu, pengungkapan risiko menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama bagi para pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi yang andal untuk pengambilan keputusan investasi yang tepat.

Risiko tidak dapat sepenuhnya dihindarkan atau dihapuskan, tetapi melalui pengelolaan yang terstruktur, potensi kerugian dapat dikendalikan, diminimalkan, bahkan diperkirakan. Dalam hal ini, *enterprise risk management* sebagai sistem pengelolaan risiko yang berfungsi meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengantisipasi berbagai jenis risiko secara menyeluruh di semua tingkatan dan unit bisnis, yang berujung pada peningkatan daya saing dan kinerja jangka panjang (Sahida, 2024). Menurut Pratiwi & Dewi, (2023) pengungkapan *enterprise risk management* merupakan proses penyampaian informasi secara transparan mengenai kebijakan, prosedur, dan hasil pengelolaan risiko perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan, baik melalui laporan tahunan maupun dokumen pelaporan lainnya. Pengungkapan *enterprise risk management* yang memadai dinilai mampu meningkatkan kepercayaan investor karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi risiko dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian (Fadilah & Nugroho, 2022).

Dalam kerangka tata kelola perusahaan, penerapan dan pengungkapan *enterprise risk management* dapat dipahami lebih dalam melalui perspektif teori agensi. Teori agensi menjelaskan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* yang timbul akibat adanya asimetri informasi (Iswajuni et al., 2018). Dalam konteks ini, *enterprise risk management* berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mampu mengurangi ketidakseimbangan informasi, mencegah perilaku oportunistik manajer, serta menyelaraskan keputusan manajemen dengan kepentingan pemilik. Maka dari itu, peran *enterprise risk management* menjadi penting sebagai alat pengendalian internal yang mendukung transparansi, meningkatkan akuntabilitas

manajemen, serta memperkuat kepercayaan pemilik dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan risiko perusahaan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis, pengungkapan *enterprise risk management* menjadi elemen yang krusial dalam menciptakan transparansi dan kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Melalui pengungkapan *enterprise risk management*, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya dalam mengelola risiko secara sistematis dan strategis, yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Pengungkapan tersebut memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi kinerja maupun keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukan bahwa, pengungkapan *enterprise risk management* memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan serta memperkuat reputasi di mata publik dan pasar modal (Anggreni et al., 2021).

Penerapan *International Standard Organization* (ISO) 31000:2018 menjadi elemen kunci dalam memperkuat pelaksanaan *enterprise risk management* karena standar ini menyediakan prinsip dan kerangka kerja yang sistematis untuk memastikan manajemen risiko terintegrasi ke dalam seluruh aktivitas organisasi. ISO 31000:2018 menegaskan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan penyusunan kebijakan perusahaan. Melalui prinsip-prinsip seperti integrasi, struktur yang berbasis bukti, inklusivitas, serta dinamika adaptif, standar ini membantu perusahaan membentuk budaya risiko yang konsisten di berbagai tingkatan organisasi. Prinsip-prinsip tersebut juga memperluas cakupan pengungkapan *enterprise risk management*, tidak hanya sebagai fungsi yang berorientasi pada kepatuhan, tetapi sebagai elemen strategis yang menopang pencapaian tujuan perusahaan dan memaksimalkan nilai bagi pemangku kepentingan (Syahrul et al., 2021).

Dengan ditetapkannya standar ISO 31000 tahun 2018, penelitian ini menggunakan 31 unsur pengungkapan yang ditetapkan dalam standar tersebut. Unsur-unsur pengungkapan itu meliputi enam dimensi pokok, yaitu kepemimpinan

dan komitmen, integrasi, perancangan, pelaksanaan, penilaian, serta perbaikan terhadap kerangka kerja pengelolaan risiko. Salah satu aspek yang menjadi pembeda utama antara ISO 31000 dan standar manajemen risiko lainnya ialah bahwa ISO 31000 memiliki pendekatan yang lebih bersifat prinsipil (*principle-based*) dibandingkan standar lain. ISO 31000 menekankan fleksibilitas, penyesuaian, dan keberlanjutan proses risiko sehingga dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi tanpa batasan sektor (Alaa Hussein & Kamel Jawad, 2024).

Salah satu contoh kegagalan pengungkapan manajemen risiko di sektor perbankan Indonesia dapat ditemukan pada kasus PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang menjadi sorotan publik dan regulator pada Mei 2023. Gangguan layanan perbankan BSI bermula pada 8 Mei 2023, ketika seluruh kanal layanan digital, meliputi *mobile banking*, mesin ATM, dan layanan teller di kantor cabang, mengalami disfungsionalitas secara serempak. Layanan BSI mengalami gangguan berhari-hari dan sistem bank syariah terbesar di Indonesia itu mengalami gangguan sejak Senin, 8 Mei 2023. Pada tahap awal, pihak manajemen BSI memberikan keterangan resmi bahwa gangguan yang terjadi disebabkan oleh pemeliharaan sistem yang sedang berlangsung. Namun pernyataan tersebut kemudian terbantahkan, sebagaimana diberitakan pihak BSI awalnya belum mengkonfirmasi penyebab dari gangguan sistem tersebut, namun belakangan kelompok *hacker ransomware* LockBit mengaku bertanggung jawab atas gangguan semua layanan di BSI. Kelompok peretas yang diidentifikasi sebagai LockBit 3.0 tersebut mengekstraksi sekitar 1,5 terabyte data internal BSI, termasuk data pribadi 15 juta nasabah dan informasi 24.000 karyawan, serta mengajukan permintaan tebusan dengan mengancam bahwa mereka akan merilis semua data di *web gelap* jika negosiasi dengan pihak BSI gagal.

Insiden ini menimbulkan kerugian yang bersifat material maupun imaterial. Dari dimensi material, sejumlah nasabah melaporkan kehilangan dana akibat terganggunya layanan transaksi, salah satu nasabah asal Solo bahkan mengklaim mengalami kerugian senilai Rp378.251.749. Dari dimensi imaterial, reputasi BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia mengalami penurunan kepercayaan publik yang signifikan. Ketidaktransparanan respons awal manajemen

memperburuk situasi dan mencerminkan ketidakselarasan antara narasi pengungkapan risiko dalam laporan tahunan dengan kapabilitas mitigasi risiko yang sesungguhnya. Dari perspektif *enterprise risk management*, kasus ini mengindikasikan adanya *risk disclosure gap* yang substansial. Meskipun BSI secara formal telah mencantumkan kerangka manajemen risiko teknologi informasi beserta mekanisme mitigasi ancaman siber dalam laporan tahunannya, realitas operasional yang terungkap menunjukkan bahwa sistem ketahanan keamanan siber belum diimplementasikan secara memadai. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengungkapan risiko dalam laporan keuangan tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan institusi dalam menghadapi risiko operasional yang bersifat teknologis (www.tempo, 2023).

Permasalahan manajemen risiko di sektor perbankan juga tercermin dari kasus yang terjadi pada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Operational Banking Office (OBO) Bengkalis, Riau, selama periode Oktober 2020 hingga Juni 2022, yang menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam penerapan *enterprise risk management* pada tataran operasional cabang. Kasus ini bermula ketika pada Juni 2023, tim kontrol internal BNI cabang Dumai melakukan pengolahan data portofolio kredit secara acak terhadap 16 debitur di BNI KCP Bengkalis dan menemukan adanya kejanggalan dalam penyaluran fasilitas KUR yang tidak sesuai ketentuan. Audit internal yang kemudian dilakukan secara menyeluruh mengungkap bahwa sebanyak 654 debitur telah disalahgunakan nama dan identitasnya untuk kepentingan pihak lain, dengan total penyaluran KUR yang tercatat mencapai Rp65,2 miliar sepanjang periode Oktober 2020 hingga Juni 2022.

Kasus ini melibatkan dua mantan pimpinan cabang secara bergantian, yakni Romy Rizki yang menjabat sebagai pimpinan BNI KCP OBO Bengkalis pada periode Agustus 2017 hingga Maret 2021, serta Eko Ruswidyanto yang menjabat pada periode Maret 2021 hingga Oktober 2022, bersama dengan Doni Suryadi selaku penyelia pemasaran. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi, menyatakan bahwa tersangka melakukan tindak pidana tersebut pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dan bahwa mereka tidak hanya menikmati uang

negara, tetapi juga melakukan penipuan-penipuan dan data-data fiktif di bank BUMN tersebut. Dalam proses penyidikan yang berlangsung sejak Februari 2024, ditemukan bahwa para pelaku memberikan fasilitas pembiayaan KUR kepada 450 debitur perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, tanpa melakukan verifikasi dan survei terhadap kebenaran identitas debitur, keabsahan usaha, serta aset yang dijadikan jaminan. Akibat perbuatan tersebut, kerugian keuangan negara yang teridentifikasi mencapai Rp46.617.192.219. Proses hukum terus berkembang pada Oktober 2024 tujuh tersangka baru ditetapkan yang merupakan pihak-pihak yang diuntungkan dari skema tersebut, termasuk pengurus koperasi dan kepala desa, sebelum akhirnya seluruh berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau pada Desember 2024 untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Dari perspektif *enterprise risk management*, insiden ini menggambarkan kegagalan pada komponen pengawasan dan pengendalian risiko kredit di tingkat operasional cabang. Kasus ini mulai terkuak justru bukan melalui sistem pengawasan risiko yang berjalan secara rutin, melainkan melalui pemeriksaan acak yang dilakukan oleh kontrol internal dari kantor cabang lain. Fakta bahwa *fraud* berlangsung selama hampir dua tahun tanpa terdeteksi mengindikasikan bahwa mekanisme *early warning* dan verifikasi penyaluran kredit tidak berfungsi secara optimal. Meskipun BNI secara formal telah mengungkapkan kerangka manajemen risiko kredit beserta mekanisme pengawasan berbasis risiko dalam laporan tahunannya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan internal di tingkat cabang belum diimplementasikan secara konsisten dan memadai. Ketidaksesuaian antara pengungkapan *enterprise risk management* dalam dokumen resmi perusahaan dan kapasitas aktual sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya *fraud* pada tataran operasional mencerminkan adanya *risk disclosure gap* yang signifikan (www.antara news, 2024).

Secara empiris, sejumlah penelitian di Indonesia telah mengidentifikasi faktor-faktor tata kelola perusahaan yang memengaruhi pengungkapan *enterprise risk management*. Barlian, (2022) menemukan bahwa komisaris independen, leverage, profitabilitas, dan *risk management committee* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management*. Sejalan dengan temuan

tersebut, Desak & Annisa, (2020) juga menunjukkan bahwa komisaris independen, profitabilitas, serta *risk management committee* berperan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan risiko perusahaan. Selain itu, (Ester & Ginting, 2023) menunjukkan bahwa komisaris independen dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *enterprise risk management*, yang mencerminkan peran pengawasan dan pengendalian pemilik dalam mendorong keterbukaan informasi risiko. Selain itu juga, Harymawan et al., (2021) menunjukkan bahwa keberadaan *risk management committee* berperan dalam meningkatkan kualitas penerapan dan pengungkapan *enterprise risk management* secara terintegrasi. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa mekanisme tata kelola yang bersifat struktural, baik melalui fungsi pengawasan dewan, struktur kepemilikan, maupun peran manajemen risiko, memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas dan keterbukaan informasi risiko perusahaan.

Pengungkapan risiko pada sektor perbankan mendapat perhatian serius dari pemerintah, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mewajibkan perbankan untuk menerapkan prinsip tata kelola yang kuat dengan dukungan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi. Regulasi tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa setiap bank wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk melalui laporan keberlanjutan maupun laporan terstruktur lainnya. Kewajiban ini diperkuat lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank guna menciptakan laporan yang berintegritas, akurat, dan dapat dipercaya oleh regulator maupun masyarakat luas. Kedua regulasi tersebut mencerminkan tingginya standar pengelolaan dan pengungkapan risiko yang diharapkan dari institusi perbankan, sekaligus menegaskan bahwa ketentuan terkait *enterprise risk management* di sektor perbankan bersifat lebih ketat dan mengikat dibandingkan sektor non-keuangan. Adapun gambaran mengenai tingkat

pengungkapan *enterprise risk management* di sektor perbankan dapat dilihat pada data periode 2018–2022 berikut ini.

Tabel 1. 1 Data Pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang terdaftar di Brusa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2024

No	Nama Perusahaan	Total Pengungkapan (%)					Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	(%)
1	Bank Raya Indonesia Tbk.	65%	74%	74%	77%	81%	74%
2	Bank IBK Indonesia	52%	58%	55%	65%	65%	59%
3	Bank Amar Indonesi	71%	71%	74%	74%	74%	73%
4	Bank Jago Tbk.	68%	71%	71%	71%	71%	70%
5	Bank MNC Internasional Tbk.	68%	81%	81%	81%	81%	78%
6	Bank Capital Indonesia Tbk.	48%	68%	68%	68%	68%	64%
7	Bank Aladin Syariah Tbk.	84%	84%	84%	84%	84%	84%
8	Bank Central Asia Tbk.	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Allo Bank Indonesia Tbk.	65%	65%	77%	77%	77%	72%
10	Bank UOB Indnesia Tbk.	65%	65%	65%	71%	71%	67%
11	Bank KB Indonesia Tbk.	71%	74%	77%	77%	77%	75%
12	Bank Mestika Dharma Tbk.	58%	58%	61%	61%	61%	60%
13	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	84%	84%	87%	87%	87%	86%
14	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	84%	84%	87%	87%	87%	86%
15	Krom Bank Indonesia	26%	55%	71%	71%	71%	59%
16	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	42%	42%	71%	74%	74%	61%
17	Bank Neo Negara (Persero) Tbk.	65%	65%	65%	71%	71%	67%
18	Bank Jtrust Indonesia Tbk.	84%	84%	84%	84%	84%	84%
19	Bank Danamon Indonesia Tbk.	71%	71%	71%	71%	71%	71%
20	Bank Pembangunan Daerah Banten	77%	77%	77%	81%	81%	79%
21	Bank Ganesha Tbk.	81%	81%	81%	81%	81%	81%
22	Bank Ina Perdana Tbk.	52%	55%	55%	55%	55%	54%

23	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk.	71%	71%	77%	77%	77%	75%
24	Bank Jabar Banten Syariah Tbk.	84%	87%	87%	87%	87%	86%
25	Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk.	81%	81%	81%	81%	81%	81%
26	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	94%	94%	94%	94%	94%	94%
27	Bank QNB Indonesia Tbk.	77%	81%	81%	81%	81%	80%
28	Bank Maspion Indonesia Tbk.	68%	68%	68%	68%	68%	68%
29	Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tbk.	55%	55%	58%	61%	61%	58%
30	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	77%	77%	90%	90%	90%	85%
31	Bank Mandiri Taspen Tbk.	68%	68%	68%	68%	68%	68%
32	Bank Bumi Arta Tbk.	74%	74%	74%	74%	74%	74%
33	Bank CIMB Niaga Tbk.	52%	52%	52%	52%	52%	52%
34	Bank Maybank Indonesia Indonesia Tbk.	48%	48%	48%	55%	55%	51%
35	Bank Permata Tbk.	77%	74%	74%	84%	84%	79%
36	Bank Syariah Indonesia Tbk.	68%	68%	68%	68%	68%	68%
37	Bank Sinarmas Tbk.	58%	58%	58%	68%	68%	62%
38	Bank Of India Indonesia Tbk.	32%	32%	58%	58%	58%	48%
39	Bank SMBC Syariah Tbk.	71%	71%	71%	71%	71%	71%
40	Bank BTPN Syariah Tbk.	44%	44%	44%	44%	44%	44%
41	Bank Victoria Internasional Tbk.	81%	84%	84%	84%	84%	83%
42	Bank Oke Indonesia Tbk.	81%	81%	81%	81%	81%	81%
43	Bank Arta Graha Internasional Tbk.	71%	71%	71%	77%	77%	73%
44	Bank Keb Hana Indonesia	48%	48%	48%	48%	48%	48%
45	Bank Multiarta Sentosa Tbk.	58%	61%	61%	77%	77%	67%
46	Bank Mayapada Internasional Tbk.	55%	55%	65%	68%	68%	62%
47	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	58%	58%	68%	68%	68%	64%

48	Bank Mega Tbk.	55%	55%	61%	74%	74%	64%
49	Bank OCBC NISP Tbk.	55%	77%	77%	77%	77%	73%
50	Bank Natinalnobu Tbk.	61%	68%	77%	77%	77%	72%
51	Bank Pan Indonesia Tbk.	65%	65%	65%	65%	65%	65%
52	Bank Panin Dubai Syariah Tbk.	58%	58%	58%	58%	58%	58%
53	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	68%	68%	68%	68%	71%	69%
54	Super Bank Indonesia Tbk.	26%	26%	65%	65%	65%	49%
	Rata-Rata Pertahun	65%	67%	71%	73%	73%	
	Rata-Rata Keseluruhan			70%			

Berdasarkan Tabel 1.1, data pengungkapan *enterprise risk management* pada 54 perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pengungkapan *enterprise risk management* seluruh perusahaan sampel mencapai 70%, dengan rata-rata per tahun yang terus meningkat, yaitu 65% pada tahun 2020, 67% pada tahun 2021, 71% pada tahun 2022, 73% pada tahun 2023, dan 73% pada tahun 2024.

Tren peningkatan tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran dan komitmen perusahaan perbankan dalam menerapkan serta mengungkapkan praktik manajemen risiko secara transparan, yang sejalan dengan semakin ketatnya regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tata kelola dan pelaporan keuangan perbankan. Meskipun demikian, terdapat variasi yang cukup signifikan antar perusahaan. Beberapa perusahaan mencatatkan tingkat pengungkapan yang tinggi dan konsisten sepanjang periode pengamatan, seperti Bank Central Asia Tbk dengan rata-rata 90%, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan rata-rata 94%, serta Bank Aladin Syariah Tbk dan Bank Jtrust Indonesia Tbk yang masing-masing mencatatkan rata-rata 84%. Sebaliknya, sejumlah perusahaan masih mencatatkan tingkat pengungkapan yang relatif rendah, seperti Super Bank Indonesia Tbk dengan rata-rata hanya 49%, Bank Of India Indonesia Tbk sebesar 48%, serta Bank BTPN Syariah Tbk sebesar 44%.

Variasi tingkat pengungkapan *enterprise risk management* yang terjadi antar perusahaan perbankan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat pengungkapan yang memadai merupakan cerminan dari kualitas tata kelola dan transparansi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Kondisi ini mendorong perlunya penelitian yang secara empiris mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan *enterprise risk management*, seperti komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, dan risk management committee di sub sektor perbankan Indonesia.

Faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi pengungkapan *enterprise risk management* adalah keberadaan komisaris independen. Pasaribu & Wicaksono (2020) mengungkapkan bahwa komisaris independent merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan pemegang saham pengendali maupun pihak manajemen, sehingga keberadaannya dianggap mampu meningkatkan objektivitas dan efektivitas pengawasan perusahaan. Secara empiris, efektivitas ini diukur melalui proporsi komisaris independen, yaitu rasio jumlah anggota komisaris independen dibagi jumlah total anggota dewan komisaris. Keberadaan proporsi yang memadai dari komisaris independen mentransformasi fungsi pengawasan dewan dari formalitas nominal menjadi substansial. Hal ini sejalan dengan penelitian Wardani & Kusuma (2022) yang menegaskan bahwa peran objektif komisaris independen ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap kemampuan perusahaan mengelola ketidakpastian.

Hasil penelitian Azizah & Cahyonowati (2023) serta Wardani & Kusuma (2022) menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management*, sejalan dengan temuan Indarti, Apriliyani & Onasis (2023), Cahyono (2023), Adnyana et al., (2023), Sinarasri et al., (2024), serta Haryanti & Hardiyanti (2022) yang juga membuktikan adanya pengaruh positif komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan *enterprise risk management*, sementara hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Setiawan & Yuliani (2021) serta Christian, Rasyid & Ferdiansah

(2024) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

Faktor kedua adalah konsentrasi kepemilikan. Santoso & Kurniawan (2024) mengungkapkan bahwa konsentrasi kepemilikan merupakan faktor tata kelola yang menciptakan sentralisasi kekuatan pengambilan keputusan strategis mengenai risiko, yang secara fundamental memengaruhi penetapan *risk appetite* dan budaya risiko perusahaan. Konsentrasi kepemilikan diukur dalam penelitian empiris melalui persentase kepemilikan saham oleh sejumlah pemegang saham terbesar (misalnya, lima pemegang saham non-manajemen terbesar). Secara teori, pengaruh ini bersifat *dualistic* di satu sisi, pemegang saham pengendali dapat menggunakan otoritas mereka untuk menuntut implementasi *enterprise risk management* yang ketat dan disiplin guna melindungi investasi jangka panjang. Namun, di sisi lain, sentralisasi kekuatan juga meningkatkan risiko oportunisme (*risk-shifting*), di mana pemegang saham pengendali mungkin memiliki insentif untuk melemahkan kerangka *enterprise risk management* formal, memungkinkan manajemen mengambil risiko yang berlebihan demi keuntungan privat, yang berpotensi memperburuk profil risiko perusahaan secara keseluruhan (Amelia & Putri, 2023).

Hasil penelitian Pratiwi & Sari (2022) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap *enterprise risk management*, sejalan dengan temuan Herlambang & Hapsari (2024) yang membuktikan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko dalam konteks nilai perusahaan. Suyatmin et al., (2022) juga menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management* di industri perbankan. Sementara itu, Annisa et al., (2020) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management* meskipun dengan arah pengaruh negatif. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Novita (2024) yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

Faktor terakhir adalah *risk management committee* atau komite manajemen risiko. Ahmad & Luthfi (2021) mengungkapkan bahwa *risk management committee*

adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris, yang bertugas membantu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan risiko yang dilakukan manajemen. Penelitian empiris, efektivitas *risk management committee* diukur menggunakan variabel *dummy*. Nilai 1 diberikan jika terdapat *risk management committee* dan nilai 0 jika tidak terdapat *risk management committee*. Kedudukan *risk management committee* sangat fundamental dalam kerangka *enterprise risk management* karena komite ini berfungsi sebagai lapisan *check and balance* kunci yang menjamin manajemen risiko terintegrasi penuh, memvalidasi kecukupan kebijakan risiko (*risk appetite*), dan memastikan efektivitas implementasi *enterprise risk management* di seluruh entitas. Penelitian Simanjuntak (2023) menegaskan bahw *risk management committee* menjembatani pengawasan dewan dengan eksekusi manajemen, sehingga keberadaannya merupakan indikasi komitmen perusahaan terhadap transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan risiko.

Hasil penelitian Simanjuntak (2023) serta Santoso & Puspitasari (2022) menunjukkan bahwa variabel *risk management committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *enterprise risk management*, sejalan dengan temuan Putri & Ramadhani (2022) yang juga membuktikan adanya pengaruh positif *risk management committee* terhadap pengungkapan *enterprise risk management*. Selain itu, penelitian Fadilla (2024) turut menunjukkan bahwa komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan *enterprise risk management*. Sementara itu, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Khoerunnisa (2024) serta Wibowo & Handayani (2023) yang menyatakan bahwa *risk management committee* tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

Berdasarkan fenomena tingginya pengungkapan risiko pada perusahaan perbankan di Indonesia yang belum sepenuhnya diimbangi dengan efektivitas implementasi *enterprise risk management* mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan struktural yang ada belum mampu secara optimal mereduksi konflik kepentingan maupun asimetri informasi antara prinsipal dan agen, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teoritis teori agensi. Kondisi tersebut tercermin dari berbagai kasus yang terjadi pada institusi perbankan di Indonesia, di mana

pengungkapan manajemen risiko dalam laporan tahunan tidak selalu mencerminkan kesiapan dan kapabilitas pengendalian risiko yang sesungguhnya di tataran operasional, sehingga menimbulkan kesenjangan antara narasi pengungkapan dan realitas implementasi atau yang dikenal sebagai *risk disclosure gap*.

Di sisi lain, penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, dan *risk management committee* terhadap pengungkapan *enterprise risk management* pada perusahaan perbankan masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel tata kelola perusahaan dan kualitas pengungkapan *enterprise risk management* masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut, khususnya dalam konteks industri perbankan Indonesia yang memiliki karakteristik regulasi dan struktur kepemilikan yang khas.

Berdasarkan uraian kesenjangan teoritis dan empiris tersebut, terdapat celah penelitian yang relevan dan perlu untuk dieksplorasi lebih lanjut. Maka dari itu, peneliti memperluas kajian dalam bidang pengungkapan *enterprise risk management* dengan mengangkat judul penelitian: **"Pengaruh Komisaris Independen, Konsentrasi Kepemilikan dan *Risk Management Committee* (RMC) terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2024)."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan *enterprise risk management*?
2. Bagaimana pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management*?

3. Bagaimana pengaruh *risk management committee* terhadap pengungkapan *enterprise risk management*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan fakta empiris yang dapat menjelaskan tentang:

1. Pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.
2. Pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management.*
3. Pengaruh *risk management committee* terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada investor maupun kreditur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit dengan melihat begaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharpkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mengimplementasikan teori pada praktik sebenarnya, khususnya mengenai konsep akuntansi berkaitan den gan komisaris independen, konsentrasi kepemilikan dan *risk management committee* dan pengungkapan *enterprise risk management*.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai dasar dalam membentuk kebijakan dalam hal pengungkapan *enterprise risk management*.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan peningkatan pengetahuan dan bahan referensi di bidang akuntansi. Selain itu, pihak lain yang memerlukan informasi mengenai pengaruh komisaris independen, konsentrasi kepemilikan dan *risk management committee* terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.